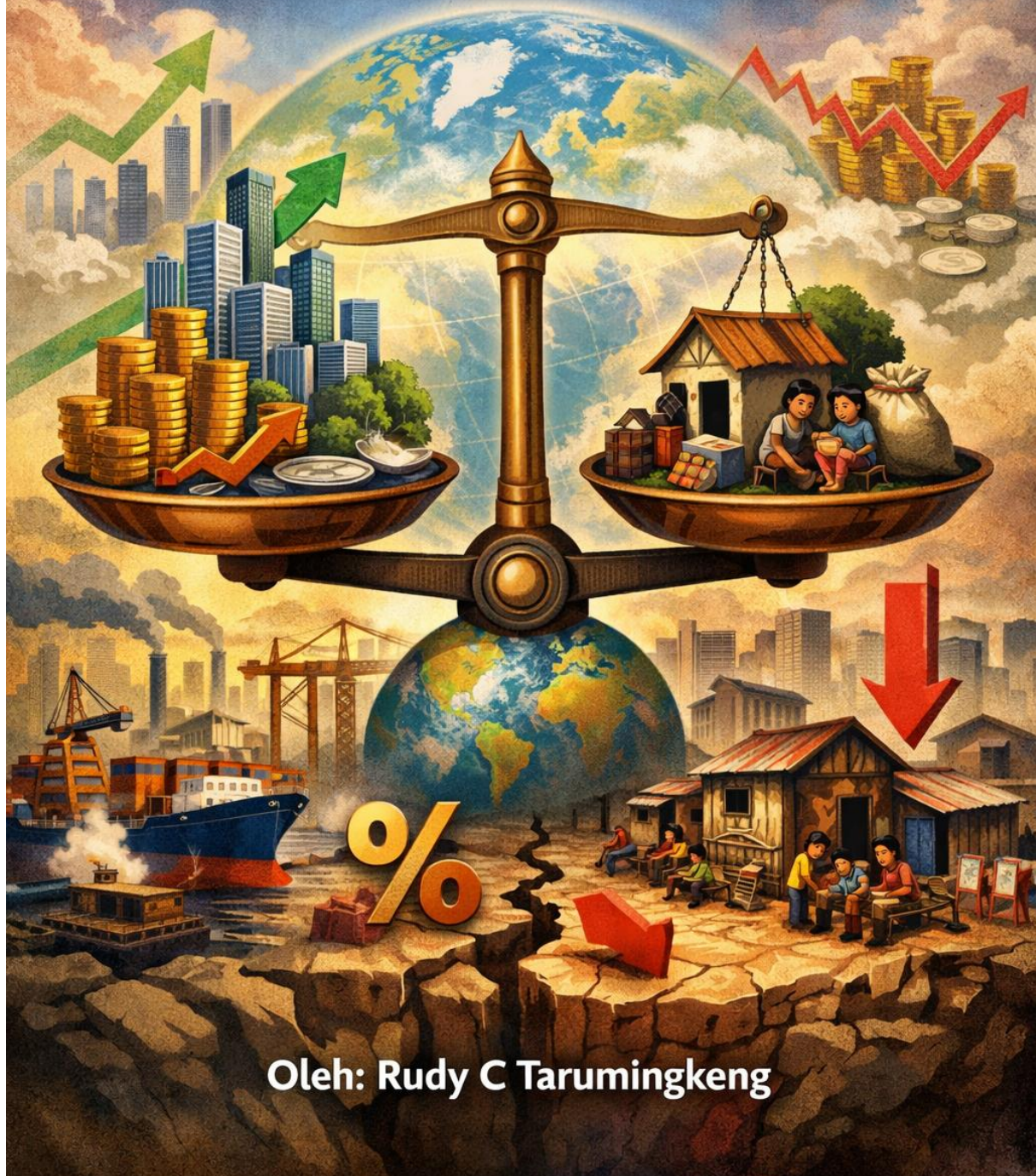


STABILITAS MAKROEKONOMI:

Antara Pertumbuhan dan Ketimpangan



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Guru Besar Manajemen NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988)

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta

STABILITAS MAKROEKONOMI: ANTARA PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN

1) Pengantar: mengapa “stabil” tidak selalu berarti “adil”, dan “tumbuh” tidak selalu berarti “sehat”

Dalam diskursus kebijakan publik, istilah *stabilitas makroekonomi* sering dipakai sebagai prasyarat bagi pembangunan: inflasi terkendali, nilai tukar tidak bergejolak, defisit fiskal terkelola, sistem keuangan tahan guncangan, serta neraca eksternal tidak rapuh. Narasi arus utama ini benar—tanpa stabilitas, ekonomi mudah tergelincir pada krisis yang merusak investasi, mengikis daya beli, dan memicu pengangguran.

Namun, pada level sosial, stabilitas dan pertumbuhan tidak otomatis menghadirkan pemerataan. Dalam banyak pengalaman negara berkembang—termasuk Indonesia—pertumbuhan dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan yang tetap tinggi atau bahkan membesar, terutama bila manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor, wilayah, atau kelompok tertentu. Data ketimpangan Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa pada September 2024 gini ratio tercatat 0,381; di perkotaan 0,402 dan di perdesaan 0,308. Pada saat yang sama, porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah tercatat 18,41% (perkotaan 17,44%; perdesaan 21,39%). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka-angka ini memberi sinyal penting: ketimpangan tidak hanya soal “siapa yang kaya”, melainkan tentang struktur kesempatan (akses pendidikan, pekerjaan formal, layanan kesehatan, konektivitas, dan kredit) yang membentuk lintasan hidup masyarakat.

Di sinilah dilema kebijakan muncul: **bagaimana menjaga stabilitas makro untuk menopang pertumbuhan, sambil memastikan pertumbuhan itu inklusif dan tidak memproduksi ketimpangan baru**. Jika stabilitas dipahami semata-mata sebagai target angka (inflasi rendah, defisit rendah), kebijakan bisa tergelincir menjadi “stabil tetapi

eksklusif". Sebaliknya, jika pemerataan dikejar tanpa disiplin stabilitas, kebijakan dapat memicu inflasi, depresiasi nilai tukar, atau tekanan fiskal yang pada akhirnya justru paling menyakitkan kelompok rentan.

Tulisan ini menjelaskan hubungan kompleks tersebut dengan pendekatan akademik-naratif: (i) apa yang dimaksud stabilitas makro, (ii) bagaimana pertumbuhan dan ketimpangan saling memengaruhi, (iii) kanal-kanal ekonomi-politik yang membuat trade-off tampak tajam, (iv) contoh pembacaan konteks Indonesia mutakhir, dan (v) rancangan *policy mix* yang lebih inklusif.

2) Apa itu stabilitas makroekonomi? Dari “angka-angka inti” ke “ketahanan sistem”

Secara konseptual, stabilitas makroekonomi dapat dipahami sebagai **kondisi ketika perekonomian mampu tumbuh tanpa menciptakan ketidakseimbangan yang membahayakan**—baik ketidakseimbangan harga (inflasi), ketidakseimbangan eksternal (defisit transaksi berjalan yang tak berkelanjutan), ketidakseimbangan fiskal (utang/defisit yang menggerus kepercayaan), maupun ketidakseimbangan finansial (gelembung aset, kredit macet, krisis likuiditas).

Agar jelas, stabilitas makro biasanya dilihat melalui empat pilar:

1. Stabilitas harga (inflasi)

Inflasi yang rendah dan terprediksi membantu rumah tangga merencanakan konsumsi dan tabungan, serta mendorong perusahaan berinvestasi. Indonesia, misalnya, memiliki kerangka sasaran inflasi; untuk 2025, target inflasi tercantum $2,5 \pm 1\%$. ([Bank Indonesia](#)) Dalam realisasi, inflasi *headline* Oktober 2025 tercatat 2,86% (y-on-y). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Ini menggambarkan *price stability* relatif terjaga, meski variasi antardaerah tetap lebar (misalnya Sumatera Utara lebih tinggi daripada Papua). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

2. **Stabilitas nilai tukar dan neraca eksternal**

Nilai tukar yang terlalu volatil menaikkan risiko bisnis dan memicu *imported inflation*. Bank sentral biasanya melakukan bauran kebijakan: suku bunga, intervensi pasar valas, dan instrumen lindung nilai.

3. **Stabilitas fiskal (APBN yang kredibel)**

Stabilitas fiskal bukan berarti “defisit nol”, melainkan **keseimbangan antara ruang belanja pembangunan (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial) dan kredibilitas pembiayaan**. Bila ruang fiskal sempit, negara cenderung memilih kebijakan populis jangka pendek (subsidi luas yang tidak tepat sasaran) ketimbang investasi sosial jangka panjang.

4. **Stabilitas sistem keuangan (ketahanan perbankan dan pasar)**

Krisis keuangan adalah “pembesar ketimpangan”: rumah tangga miskin kehilangan pekerjaan lebih cepat, pelaku UMKM kehilangan akses kredit, sementara pemilik aset besar bisa pulih lebih cepat. Karena itu, indikator seperti CAR dan NPL dipantau ketat.

Stabilitas makro yang matang tidak berhenti pada “angka inflasi” atau “angka pertumbuhan”, melainkan juga memerhatikan *transmisi kebijakan* ke masyarakat. Di sinilah ketimpangan masuk sebagai variabel yang bukan sekadar dampak sosial, tetapi dapat menjadi faktor penentu keberlanjutan stabilitas.

3) Pertumbuhan dan ketimpangan: tiga cara akademik memandang relasinya

A. Perspektif “Kuznets”: ketimpangan naik dulu, turun kemudian

Hipotesis Kuznets (klasik) menyatakan bahwa dalam transisi dari ekonomi agraris ke industrial, ketimpangan cenderung meningkat karena produktivitas sektor modern naik lebih cepat daripada sektor tradisional.

Setelah industrialisasi matang dan pendidikan meluas, ketimpangan menurun.

Masalahnya: dalam ekonomi modern berbasis teknologi dan globalisasi, "turun kemudian" tidak otomatis terjadi. Tanpa kebijakan redistributif dan investasi manusia, ketimpangan bisa menetap.

B. Perspektif "inclusive growth": pertumbuhan harus dinilai dari distribusinya

Pendekatan *inclusive growth* menilai pertumbuhan bukan hanya dari PDB, tetapi dari **seberapa besar pendapatan kelompok bawah ikut naik**, seberapa banyak pekerjaan formal tercipta, dan apakah layanan dasar membaik. Data porsi pengeluaran 40% terbawah menjadi salah satu jendela untuk melihat apakah pertumbuhan "menetes ke bawah" secara nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

C. Perspektif "ketimpangan merusak pertumbuhan"

Literatur kontemporer menekankan bahwa ketimpangan tinggi dapat melemahkan pertumbuhan jangka panjang melalui:

- permintaan agregat yang rapuh (kelompok bawah tidak punya daya beli stabil),
- investasi manusia yang timpang (pendidikan/kesehatan hanya untuk sebagian),
- polarisasi politik yang menghambat reformasi,
- serta kredit konsumsi yang berlebihan (utang rumah tangga) untuk "menutup" ketertinggalan.

Jadi, relasinya dua arah: **pertumbuhan memengaruhi ketimpangan, dan ketimpangan memengaruhi daya tahan pertumbuhan serta stabilitas makro.**

4) Kanal utama: bagaimana stabilitas, pertumbuhan, dan ketimpangan saling mengunci

Agar tidak abstrak, bayangkan perekonomian sebagai “mesin besar” dengan beberapa jalur transmisi. Ketika pemerintah/BI “memutar tombol” kebijakan, dampaknya tidak merata bagi semua kelompok.

4.1 Kanal inflasi: “pajak tak terlihat” yang paling regressif

Inflasi cenderung paling menyakitkan kelompok miskin karena:

- porsi belanja pangan dan transport mereka lebih besar,
- tabungan mereka minim (tidak punya lindung nilai),
- daya tawar upah lemah.

Karena itu, menjaga inflasi rendah adalah kebijakan pro-rakyat—*tetapi* cara menurunkan inflasi juga penting. Jika inflasi ditekan melalui pengetatan yang terlalu agresif sehingga pekerjaan menyusut, kelompok rentan bisa terkena dua pukulan: kehilangan pendapatan *dan* harga tetap tinggi di wilayah tertentu.

Di Indonesia, inflasi Oktober 2025 tercatat 2,86% y-on-y, sementara inflasi inti 2,36% y-on-y. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka ini membantu stabilitas daya beli secara makro, meski disparitas wilayah memperlihatkan problem logistik, pasokan, dan struktur pasar di daerah tertentu. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4.2 Kanal suku bunga dan kredit: stabilitas keuangan vs kesempatan usaha

Kenaikan suku bunga menurunkan inflasi dan menjaga nilai tukar, tetapi dapat menekan kredit investasi dan konsumsi. Namun efeknya tidak simetris:

- perusahaan besar punya akses pembiayaan alternatif,
- UMKM lebih bergantung pada bank dan lebih sensitif terhadap bunga,

- rumah tangga kelas bawah sangat sensitif terhadap cicilan dan akses kredit mikro.

Kebijakan Bank Indonesia pada 2025, misalnya, menekankan stabilitas sekaligus dorongan pertumbuhan melalui penurunan BI-Rate (total 150 bps sejak Sep 2024 hingga mencapai 4,75% pada Okt 2025) dan ekspansi likuiditas, disertai upaya stabilisasi rupiah. ([Bank Indonesia](#)) Tetapi BI juga mencatat adanya *lag*: penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat, dan kredit UMKM pada Oktober 2025 bahkan tercatat berkontraksi (-0,11% y-on-y), sementara risiko kredit UMKM (NPL) memburuk. ([Bank Indonesia](#)) Ini contoh konkret bagaimana stabilitas moneter tidak otomatis berubah menjadi peluang pembiayaan untuk kelompok usaha kecil—padahal UMKM adalah jalur penting pemerataan.

4.3 Kanal pertumbuhan sektoral: “siapa yang tumbuh” menentukan “siapa yang ikut”

Pertumbuhan yang bertumpu pada sektor padat modal (misalnya ekstraktif atau proyek besar dengan serapan tenaga kerja terbatas) cenderung meningkatkan ketimpangan dibanding pertumbuhan yang didorong industri manufaktur padat kerja, agroindustri, dan jasa modern yang menyerap banyak pekerja menengah.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1-2025 sebesar 4,87% (y-on-y). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Pada Q3-2025, ekonomi tumbuh 5,04% (y-on-y), dan Jawa masih menjadi kontributor utama (56,68% PDB) dengan pertumbuhan 5,17%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Fakta spasial ini penting: ketika pertumbuhan terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, ketimpangan antardaerah mudah mengeras—bukan karena daerah “malas”, tetapi karena perbedaan akses infrastruktur, kualitas SDM, jejaring industri, dan konektivitas pasar.

4.4 Kanal teknologi dan upah: *skill-biased change*

Era digital menguntungkan pekerja dengan keterampilan tinggi (data, komputasi, manajemen kompleks), sementara pekerja rendah keterampilan menghadapi otomatisasi atau pekerjaan informal. Tanpa investasi besar pada reskilling, ketimpangan upah melebar bahkan ketika PDB naik.

4.5 Kanal kebijakan fiskal: subsidi luas vs perlindungan sosial tertarget

Banyak negara (termasuk Indonesia dalam berbagai periode) menggunakan subsidi energi sebagai “alat stabilisasi sosial” karena cepat terasa. Tetapi subsidi luas sering dinikmati lebih besar oleh rumah tangga mampu (yang konsumsi energinya tinggi). Kebijakan yang lebih pro-pemerataan adalah perlindungan sosial tertarget, peningkatan layanan publik, dan belanja yang memperkuat produktivitas kelompok bawah (pendidikan vokasi, kesehatan primer, air bersih, internet, transport publik).

5) Mengapa trade-off sering terasa tajam? Sebuah narasi rapat kebijakan

Bayangkan sebuah rapat koordinasi ekonomi pada awal kuartal: di meja ada grafik inflasi, pertumbuhan PDB, nilai tukar, defisit anggaran, dan angka gini. Para pengambil keputusan menghadapi empat “tuntutan publik” sekaligus:

1. harga harus stabil,
2. lapangan kerja harus bertambah,
3. kemiskinan harus turun,
4. ketimpangan harus mengecil.

Masalahnya, instrumen kebijakan terbatas. Prinsip Tinbergen dalam ekonomi kebijakan mengingatkan: **setiap tujuan memerlukan**

instrumen yang memadai. Jika hanya mengandalkan suku bunga untuk semua masalah, hasilnya bias: suku bunga efektif menahan inflasi, tetapi tidak cukup kuat memperbaiki kualitas pekerjaan, apalagi menutup kesenjangan pendidikan.

Karena itu, trade-off sering muncul bukan karena tujuan saling bertentangan secara absolut, melainkan karena:

- instrumen tidak lengkap,
- koordinasi antarinstansi lemah,
- kapasitas implementasi di daerah tidak merata,
- serta *political economy*: kebijakan yang paling efektif sering tidak paling populer.

6) Membaca konteks Indonesia: stabilitas relatif terjaga, tetapi “pemerataan” tetap pekerjaan besar

Jika kita susun potongan indikator mutakhir:

- **Pertumbuhan:** Q1-2025 tumbuh 4,87% (y-on-y). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Q3-2025 tumbuh 5,04% (y-on-y) dan secara spasial Jawa tetap dominan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- **Inflasi:** Oktober 2025 inflasi 2,86% (y-on-y), inflasi inti 2,36% (y-on-y). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- **Kerangka sasaran inflasi:** target 2025 tercantum $2,5 \pm 1\%$. ([Bank Indonesia](#))
- **Kebijakan moneter & stabilitas:** BI-Rate mencapai 4,75% (setelah penurunan kumulatif 150 bps sejak Sep 2024) disertai kebijakan stabilisasi rupiah dan ekspansi likuiditas. ([Bank Indonesia](#))

- **Ketimpangan:** gini 0,381 pada Sep 2024; ketimpangan perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan; porsi pengeluaran 40% terbawah 18,41%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Rangkaian ini menunjukkan gambaran “makro yang cukup terkendali”: inflasi dalam kisaran target, pertumbuhan sekitar 5%, dan kebijakan moneter berupaya menjaga stabilitas sekaligus mendukung pemulihan. Tetapi sisi distribusi memperlihatkan tantangan yang lebih struktural: ketimpangan perkotaan lebih tinggi, dan porsi konsumsi 40% terbawah masih terbatas—indikasi bahwa kelas menengah bawah dan pekerja informal belum sepenuhnya menikmati kualitas pertumbuhan yang sama.

Di lapangan, wajah ketimpangan sering bukan “orang kaya vs orang miskin” semata, melainkan:

- pekerja formal bergaji tetap vs pekerja informal dengan pendapatan fluktuatif,
- UMKM tanpa agunan vs korporasi dengan akses pembiayaan,
- kota besar dengan layanan lengkap vs daerah yang mahal logistik,
- generasi muda berpendidikan digital vs lulusan yang tersisih otomatisasi.

7) Kerangka analitis: “stabilitas inklusif” sebagai strategi, bukan kompromi

Kunci untuk keluar dari dilema “pertumbuhan vs ketimpangan” adalah mengubah paradigma: bukan memilih salah satu, melainkan **mendesain stabilitas makro sebagai fondasi untuk pertumbuhan yang inklusif**.

7.1 Stabilitas sebagai proteksi kelompok rentan

Stabilitas harga dan nilai tukar melindungi kelompok rentan dari guncangan biaya hidup. Inflasi 2,86% (Okt 2025) ([Badan Pusat Statistik](#))

[Indonesia](#)) bukan sekadar angka; ia berarti “ketidakpastian” harga tidak melonjak. Tetapi proteksi itu harus disertai kebijakan pasokan: pangan, logistik, dan persaingan usaha agar inflasi daerah yang tinggi tidak menjadi “ketidakadilan spasial”.

7.2 Pertumbuhan berkualitas: pekerjaan, produktivitas, dan mobilitas

Pertumbuhan yang inklusif menuntut tiga hal:

1. penciptaan pekerjaan formal dan semi-formal,
2. kenaikan produktivitas UMKM,
3. mobilitas sosial melalui pendidikan dan kesehatan.

BPS mencatat sektor-sektor tertentu tumbuh tinggi pada kuartal tertentu (misalnya pendidikan mencatat pertumbuhan tinggi pada Q3-2025).

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Tetapi pertanyaannya: apakah pertumbuhan sektor-sektor itu menghasilkan pekerjaan yang dapat diakses kelompok bawah, atau hanya memperkuat segmen tertentu?

7.3 Ketimpangan sebagai risiko stabilitas

Ketimpangan tinggi sering mendorong:

- kebijakan populis jangka pendek (subsidi luas, ekspansi kredit konsumtif),
- tekanan politik untuk belanja yang kurang produktif,
- serta siklus utang rumah tangga.

Dengan kata lain, **ketimpangan bukan sekadar problem moral; ia juga problem stabilitas.**

8) Policy mix: resep praktis untuk menyeimbangkan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan

Berikut rancangan bauran kebijakan yang secara teori dan praktik paling masuk akal untuk konteks negara seperti Indonesia. Saya susun dalam bentuk “narasi kebijakan”, seolah-olah pemerintah merancang paket terpadu.

8.1 Kebijakan moneter yang kredibel + transmisi ke sektor produktif

Kerangka sasaran inflasi (mis. 2025: $2,5 \pm 1\%$) ([Bank Indonesia](#)) penting untuk mengikat ekspektasi pelaku ekonomi. Namun yang lebih menentukan pemerataan adalah transmisi: apakah penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas betul-betul menurunkan bunga kredit produktif.

BI mencatat pelonggaran moneter dan ekspansi likuiditas, tetapi penurunan suku bunga kredit berjalan lambat dan kredit UMKM sempat berkontraksi. ([Bank Indonesia](#)) Maka kebijakan moneter perlu ditopang instrumen makroprudensial yang *targeted*: insentif likuiditas untuk kredit UMKM produktif, penjaminan risiko bersama, serta penguatan *credit scoring* berbasis data transaksi (tanpa mengorbankan privasi).

8.2 Kebijakan fiskal yang pro-produktivitas kelompok bawah

Pemerataan yang berkelanjutan hampir selalu datang dari:

- pendidikan dan vokasi yang relevan,
- layanan kesehatan primer,
- infrastruktur dasar (air, sanitasi, listrik, internet),
- perlindungan sosial tertarget,
- serta dukungan UMKM (akses pasar, standardisasi, logistik).

Subsidi bisa tetap diperlukan sebagai “peredam guncangan”, tetapi desainnya harus makin presisi: mengurangi kebocoran ke kelompok atas dan mengalihkan sebagian ruang fiskal ke investasi manusia.

8.3 Reformasi struktural: dari dualisme pasar kerja ke jalur mobilitas

Indonesia memiliki dualisme: pasar kerja formal (berperlindungan) dan informal (rentan). Solusi pemerataan bukan hanya “bansos”, tetapi membangun jembatan: sertifikasi keterampilan, *micro-credential*, *apprenticeship*, dan ekosistem industri daerah.

8.4 Strategi spasial: menurunkan “biaya jarak” antardaerah

Karena Jawa menyumbang porsi terbesar PDB dan tetap menjadi motor pertumbuhan ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)), strategi pemerataan perlu memerangi biaya logistik, memperkuat konektivitas pelabuhan–jalan–gudang, serta membangun klaster agroindustri di luar pusat tradisional. Pemerataan bukan “memindahkan uang”, tetapi **memindahkan kesempatan**.

8.5 Tata kelola data dan evaluasi: dashboard “pertumbuhan inklusif”

Agar kebijakan tidak reaktif, pemerintah perlu *dashboard* indikator:

- inflasi (nasional & daerah),
- pertumbuhan sektoral,
- upah riil & kualitas kerja,
- akses kredit UMKM,
- gini & porsi konsumsi 40% terbawah,
- serta mobilitas pendidikan dan kesehatan.

Data BPS tentang gini dan porsi 40% terbawah ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) dapat menjadi jangkar evaluasi: jika pertumbuhan naik tetapi porsi 40% terbawah stagnan, maka pertumbuhan belum cukup inklusif.

9) Contoh kasus naratif: dua rumah tangga, satu kebijakan, efek berbeda

Kasus 1: Keluarga pekerja informal di pinggiran kota

Pendapatan harian bergantung pada pesanan. Ketika inflasi naik, mereka

langsung mengurangi kualitas konsumsi (protein, pendidikan tambahan anak, transport). Stabilitas inflasi pada kisaran 2–3% memberi mereka “ruang napas” ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)), tetapi tantangan utama bukan inflasi semata: akses pekerjaan stabil dan kredit produktif untuk usaha kecil.

Kasus 2: Keluarga kelas menengah pemilik aset

Mereka punya tabungan, investasi, dan akses kredit bank. Bahkan ketika suku bunga naik, mereka masih bisa mengelola. Ketika suku bunga turun, mereka menikmati peluang investasi lebih cepat daripada kelompok pertama. Inilah alasan mengapa transmisi kebijakan kredit ke UMKM menjadi isu pemerataan (BI sendiri menandai perlambatan/kontraksi kredit UMKM pada periode tertentu). ([Bank Indonesia](#))

Satu kebijakan makro bisa “netral” dalam teori, tetapi tidak netral dalam distribusi. Karena itu, stabilitas makro perlu dilengkapi kebijakan mikro yang *pro-poor* dan *pro-opportunity*.

10) Penutup: dari “stabilitas angka” menuju “stabilitas sosial”

Pada akhirnya, stabilitas makroekonomi bukan tujuan akhir, melainkan *public infrastructure* yang membuat masyarakat bisa merencanakan masa depan. Pertumbuhan ekonomi—misalnya pertumbuhan Indonesia yang sekitar 5% pada beberapa kuartal 2025 ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))—memberi ruang fiskal dan optimisme investasi. Inflasi yang relatif terkendali ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) mengurangi ketidakpastian biaya hidup. Namun ketimpangan yang masih nyata (gini 0,381; porsi 40% terbawah 18,41%) ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) mengingatkan bahwa “mesin ekonomi” belum sepenuhnya menghasilkan mobilitas sosial yang merata.

Karena itu, jalan tengah yang ilmiah bukan kompromi setengah hati, melainkan desain kebijakan yang lebih cerdas: **stabilitas yang menjaga**

daya beli, pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan berkualitas, dan pemerataan yang membangun kapasitas manusia serta akses kesempatan. Jika tiga pilar ini berjalan serempak, pertumbuhan tidak perlu “dibayar” dengan ketimpangan; sebaliknya, pemerataan justru menjadi sumber stabilitas dan tenaga pendorong pertumbuhan jangka panjang.

Refleksi

1. **Stabilitas makro sebagai “kontrak sosial yang tak tertulis”**
Sering kali stabilitas dipahami sebagai urusan teknokrat: inflasi rendah, kurs tenang, defisit terkendali. Tetapi di mata warga, stabilitas adalah *rasa aman*: harga kebutuhan pokok tidak melonjak mendadak, pekerjaan tidak tiba-tiba hilang, cicilan tidak mencekik, dan layanan publik tetap berjalan. Maka stabilitas bukan sekadar indikator, melainkan **kepercayaan**—bahwa negara mampu menjaga “ketertiban ekonomi” tanpa mengorbankan martabat hidup kelompok rentan.
2. **Pertumbuhan itu angka; kesejahteraan itu pengalaman**
PDB bisa naik sementara kualitas hidup sebagian warga tetap rapuh. Di ruang kelas, ini sering tampak ketika mahasiswa menceritakan keluarga yang “hidup pas-pasan” walau kota mereka tumbuh pesat. Artinya, pertumbuhan perlu diuji lewat *pengalaman sosial*: apakah pekerjaan yang tercipta layak (upah, jam kerja, perlindungan), apakah mobilitas sosial terbuka, dan apakah pelayanan dasar membaik.
3. **Ketimpangan sebagai “biaya tersembunyi” dari desain kebijakan**
Ketimpangan tidak selalu lahir dari niat buruk; sering ia muncul

dari desain yang tidak peka distribusi. Misalnya, kebijakan stabilisasi yang efektif menurunkan inflasi bisa sekaligus menekan kredit untuk usaha kecil jika transmisi perbankan tidak berpihak. Di sini pelajaran pentingnya: **kebijakan makro selalu punya dampak mikro yang berbeda-beda.**

4. **Dilema kebijakan bukan hitam-putih, melainkan soal urutan dan kombinasi**

Banyak perdebatan jatuh pada dikotomi: "pilih inflasi rendah atau lapangan kerja." Padahal kuncinya adalah *sequencing* dan *policy mix*: menahan inflasi sambil melindungi kelompok rentan melalui subsidi/dukungan yang tepat sasaran, memperbaiki logistik pangan, dan memperluas akses kredit produktif.

5. **Stabilitas yang terlalu "keras" berisiko menciptakan stabilitas semu**

Jika stabilitas dicapai lewat pemangkasan belanja sosial/pendidikan atau menekan upah riil, maka stabilitas itu rapuh: ketidakpuasan sosial meningkat, produktivitas jangka panjang melemah, dan tekanan populisme menguat. Stabilitas yang sehat mestinya **menumbuhkan kapasitas**, bukan sekadar menahan gejolak.

6. **Ketimpangan adalah isu produktivitas, bukan hanya isu moral**

Ketika akses pendidikan bermutu, kesehatan, internet, dan jaringan kerja hanya dimiliki sebagian kelompok, ekonomi kehilangan talenta potensial. Ketimpangan lalu menjadi "rem" pertumbuhan jangka panjang—karena banyak orang tidak punya peluang untuk menjadi produktif secara penuh.

7. **Dimensi spasial: pusat pertumbuhan vs pinggiran kesempatan**

Dalam banyak negara berkembang, pertumbuhan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan antardaerah bukan hanya soal transfer fiskal, tetapi soal infrastruktur, konektivitas pasar, kualitas sekolah, layanan kesehatan, dan ekosistem industri

lokal. Pemerataan yang berkelanjutan adalah **pemerataan kesempatan**.

8. **Teknologi mempercepat pertumbuhan, tetapi juga mempercepat polarisasi**

Digitalisasi dapat melipatgandakan produktivitas, namun sering “menghadiahi” keterampilan tinggi lebih besar daripada keterampilan rendah. Tanpa reskilling besar-besaran, pasar kerja menjadi polaris: pekerjaan berupah tinggi tumbuh, pekerjaan menengah tergerus, pekerjaan rentan membengkak.

9. **Keadilan antargenerasi**

Kebijakan yang menjaga stabilitas hari ini tapi mengorbankan investasi pendidikan, lingkungan, atau kesehatan publik sama saja memindahkan beban ke generasi berikutnya. Stabilitas sejati bersifat antargenerasi: menahan risiko kini sambil membangun fondasi masa depan.

10. **Ukuran keberhasilan yang lebih manusiawi**

Di akhir refleksi, pertanyaan mendasarnya: *stabil untuk siapa? tumbuh untuk siapa?* Indikator makro perlu dipasangkan dengan indikator inklusi: kualitas kerja, kemiskinan, akses layanan dasar, ketahanan UMKM, dan mobilitas sosial.

Diskusi

A. Pertanyaan pemantik (kelas/FGD)

1. Apa bedanya “stabilitas makro” sebagai target teknis dan sebagai pengalaman sosial rumah tangga?
2. Dalam situasi krisis harga pangan/energi, kebijakan mana yang paling adil: subsidi luas atau bantuan tertarget? Jelaskan risiko masing-masing.

3. Apakah inflasi rendah selalu pro-rakyat? Dalam kondisi apa inflasi rendah justru tidak cukup melindungi kelompok rentan?
4. Mengapa ketimpangan perkotaan sering lebih tajam daripada perdesaan? (kaitkan dengan pasar kerja, perumahan, dan biaya hidup)
5. Bagaimana Anda membedakan “pertumbuhan berkualitas” vs “pertumbuhan rapuh”?

B. Tema debat kebijakan (format pro–kontra)

1. *Inflation targeting* harus menjadi prioritas utama, bahkan bila sementara menekan pertumbuhan.
2. Subsidi energi lebih efektif untuk stabilitas sosial daripada program perlindungan sosial tertarget.
3. Kenaikan upah minimum adalah alat utama mengurangi ketimpangan, dibanding peningkatan produktivitas dan keterampilan.
4. Pemerataan antardaerah lebih efektif melalui infrastruktur konektivitas daripada transfer dana.
5. Kredit murah untuk UMKM seharusnya diprioritaskan walau meningkatkan risiko perbankan.

C. Studi kasus naratif (untuk analisis kelompok)

Kasus: “Kota yang tumbuh, warung yang lesu”

Sebuah kota industri mengalami pertumbuhan investasi. Proyek-proyek besar berjalan, pusat perbelanjaan ramai, tetapi warung kecil dan pelaku usaha rumahan mengeluh penjualan stagnan. Pada saat yang sama, bank memperketat kredit karena kekhawatiran risiko; bunga pinjaman produktif turun sangat lambat. Pemerintah daerah menawarkan pelatihan digital, namun koneksi internet di pinggiran kota masih lemah dan biaya logistik tinggi.

Pertanyaan diskusi kasus:

1. Di mana letak “ketimpangan tersembunyi” dalam cerita ini—apakah di akses kredit, akses pasar, kualitas keterampilan, atau struktur permintaan?
2. Rancang *policy mix* 6 bulan (stabilisasi) dan 3 tahun (struktural): apa peran pemerintah pusat, daerah, bank, dan platform digital?
3. Indikator apa yang harus dipantau untuk menilai apakah pertumbuhan kota itu makin inklusif?
4. Jika Anda hanya boleh memilih 2 intervensi cepat, apa yang paling berdampak bagi usaha kecil tanpa merusak stabilitas?

D. Latihan analitis (tugas kuliah yang praktis)

1. **Peta transmisi kebijakan:** buat diagram “inflasi → suku bunga → kredit → investasi → pekerjaan → ketimpangan”. Minta mahasiswa menandai titik-titik “bocor” transmisi (mis. kredit UMKM).
2. **Dashboard inklusif:** susun 10 indikator untuk menilai stabilitas inklusif di daerah (mis. inflasi pangan, upah riil, pengangguran terbuka, proporsi pekerja informal, akses internet, akses kredit UMKM, biaya logistik).
3. **Simulasi rapat kebijakan:** bagi peran—bank sentral, kementerian keuangan, pemda, asosiasi UMKM, serikat pekerja. Setiap pihak harus mengusulkan 2 kebijakan dan menjelaskan dampak distribusinya.

Penutup diskusi

Diskusi tentang stabilitas makro, pertumbuhan, dan ketimpangan pada akhirnya adalah diskusi tentang **desain institusi** dan **keadilan kesempatan**. Stabilitas yang tidak inklusif cenderung rapuh; pemerataan tanpa stabilitas cenderung berumur pendek. Tantangan akademik

sekaligus kebijakan publik adalah merancang bauran kebijakan yang menjaga harga dan kepercayaan, sambil memperluas akses keterampilan, kredit, dan layanan dasar—agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga *mengangkat* lebih banyak orang.

Glosarium

- **APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):** Rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan; menjadi instrumen utama kebijakan fiskal.
- **Automatic stabilizers:** Mekanisme fiskal yang bekerja “otomatis” meredam siklus (mis. pajak progresif, bansos) tanpa perlu keputusan kebijakan baru.
- **Bauran kebijakan (*policy mix*):** Kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan struktural untuk mencapai beberapa tujuan sekaligus (stabilitas, pertumbuhan, pemerataan).
- **BI-Rate (7-Day Reverse Repo Rate):** Suku bunga kebijakan acuan Bank Indonesia yang menjadi sinyal arah moneter dan memengaruhi suku bunga pasar/ perbankan. ([Bank Indonesia](#))
- **Cadangan devisa:** Aset valas yang dikelola bank sentral untuk stabilisasi nilai tukar dan pembiayaan impor/utang luar negeri.
- **Defisit fiskal:** Kondisi ketika belanja pemerintah melebihi pendapatan; dibiayai melalui utang atau sumber pembiayaan lain.
- **Deflasi:** Penurunan tingkat harga umum; bila terlalu dalam/berkepanjangan dapat menekan permintaan dan laba usaha.

- **Distribusi pengeluaran 40% terbawah (ukuran Bank Dunia):** Proporsi total pengeluaran yang dinikmati kelompok 40% termiskin; indikator ringkas inklusi distribusional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- **Dualitas pasar kerja (formal–informal):** Struktur tenaga kerja yang terbelah antara pekerjaan formal (lebih terlindungi) dan informal (lebih rentan), berimplikasi pada ketimpangan pendapatan.
- **Daya beli riil:** Kemampuan konsumsi setelah memperhitungkan inflasi (upah/pendapatan riil).
- **Efisiensi–ekuitas (trade-off):** Gagasan bahwa kebijakan pemerataan dapat menimbulkan “biaya efisiensi” tertentu; sering dibahas lewat metafora *leaky bucket*. ([IMF](#))
- **Ekspektasi inflasi:** Perkiraan pelaku ekonomi tentang inflasi masa depan; bila “terjangkar” membantu stabilitas harga.
- **Ekspor barang dan jasa:** Penjualan output domestik ke luar negeri; memengaruhi PDB dan neraca eksternal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- **Financial inclusion (inklusi keuangan):** Akses rumah tangga/UMKM terhadap layanan keuangan (rekening, pembayaran, kredit, asuransi) yang terjangkau dan aman.
- **Gini ratio:** Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran/pendapatan; makin mendekati 1 berarti makin timpang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- **Imported inflation:** Inflasi yang “terbawa” dari kenaikan harga barang impor akibat kenaikan harga global atau depresiasi kurs.
- **IHK (Indeks Harga Konsumen):** Indeks yang mengukur perubahan harga keranjang barang/jasa konsumsi rumah tangga; dasar penghitungan inflasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

- **Inflasi (headline):** Inflasi umum berdasarkan IHK yang mencakup seluruh komponen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- **Inflasi inti (core inflation):** Bagian inflasi yang relatif persisten (umumnya mengecualikan komponen bergejolak dan harga diatur) untuk membaca tekanan harga fundamental.
- **Intervensi valas:** Tindakan bank sentral di pasar valuta asing untuk meredam volatilitas nilai tukar.
- **Investasi/PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto):** Komponen PDB yang mencerminkan penambahan kapasitas produksi (mesin, bangunan, infrastruktur).
- **Ketimpangan (inequality):** Kesenjangan distribusi pendapatan/pengeluaran, kekayaan, atau akses kesempatan (pendidikan, kesehatan, kredit).
- **Ketimpangan spasial (antarwilayah):** Perbedaan kesejahteraan/akses kesempatan antarprovinsi atau desa–kota yang berkaitan dengan konektivitas, industri, dan layanan publik.
- **Konsolidasi fiskal:** Strategi menurunkan defisit/menstabilkan utang melalui peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, atau reformasi subsidi.
- **Konsumsi rumah tangga:** Komponen terbesar PDB di banyak negara; sensitif terhadap inflasi dan kondisi pasar kerja.
- **Kredit produktif:** Kredit untuk kegiatan menghasilkan output/pendapatan (usaha, investasi) berbeda dari kredit konsumtif.
- **Kuznets curve (hipotesis Kuznets):** Gagasan bahwa ketimpangan meningkat pada tahap awal industrialisasi lalu menurun pada tahap lebih matang. ([American Economic Association](#))

- **Makroprudensial:** Kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (mis. pengendalian kredit, likuiditas, rasio kehati-hatian).
- **Mobilitas sosial:** Perubahan status ekonomi antargenerasi atau dalam satu siklus hidup; terkait akses pendidikan dan pasar kerja.
- **Neraca transaksi berjalan (current account):** Selisih ekspor-impor barang/jasa dan pendapatan primer/sekunder; defisit besar yang persisten dapat meningkatkan kerentanan.
- **Nilai tukar (kurs):** Harga mata uang domestik terhadap mata uang asing; berpengaruh pada inflasi impor dan biaya produksi.
- **NPL (Non-Performing Loan):** Rasio kredit bermasalah di perbankan; meningkatnya NPL dapat memperketat kredit dan menghambat pertumbuhan inklusif.
- **Output gap:** Selisih antara output aktual dan output potensial; output gap negatif biasanya menekan inflasi tetapi berisiko pada pengangguran.
- **PDB (Produk Domestik Bruto):** Nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu periode; indikator utama pertumbuhan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- **Pelonggaran moneter (monetary easing):** Penurunan suku bunga kebijakan atau penambahan likuiditas untuk mendorong permintaan dan investasi. ([Bank Indonesia](#))
- **Penargetan inflasi (inflation targeting):** Kerangka kebijakan moneter yang menempatkan sasaran inflasi sebagai jangka ekspektasi. ([Bank Indonesia](#))
- **Perlindungan sosial (social protection):** Instrumen untuk melindungi rumah tangga rentan dari guncangan (bansos, jaminan sosial, subsidi tepat sasaran).

- **Phillips curve:** Relasi jangka pendek antara inflasi dan pengangguran/aktivitas ekonomi; tidak selalu stabil, tergantung ekspektasi dan struktur ekonomi.
- **Pro-poor growth:** Pertumbuhan yang secara relatif/absolut meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin lebih cepat daripada rata-rata.
- **Redistribusi:** Pemindahan sumber daya melalui pajak dan belanja sosial untuk mengurangi ketimpangan; dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan bila dirancang baik. ([IMF](#))
- **Ruang fiskal (fiscal space):** Kapasitas pemerintah untuk menambah belanja/menurunkan pajak tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
- **Stabilitas makroekonomi:** Kondisi ketika inflasi, nilai tukar, fiskal, dan sistem keuangan terkendali sehingga ekonomi dapat tumbuh tanpa ketidakseimbangan berbahaya.
- **Stagflasi:** Inflasi tinggi bersamaan dengan pertumbuhan rendah/pengangguran tinggi; situasi kebijakan yang sulit karena instrumen “tarik-menarik”.
- **Structural transformation (transformasi struktural):** Pergeseran tenaga kerja dan output dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas lebih tinggi; kunci pertumbuhan jangka panjang.
- **Subsidi:** Dukungan harga/biaya oleh pemerintah (mis. energi/pangan); efektif meredam gejolak tetapi bisa tidak tepat sasaran bila bersifat luas.
- **Target inflasi $2,5 \pm 1\%$ (Indonesia 2025):** Sasaran inflasi nasional yang menjadi jangkar kebijakan moneter dan koordinasi pengendalian inflasi. ([Bank Indonesia](#))

- **Tinbergen rule/principle:** Untuk mencapai n target kebijakan yang independen dibutuhkan setidaknya n instrumen independen; alasan mengapa *policy mix* penting. ([Google Books](#))
- **Transmisi kebijakan moneter:** Jalur bagaimana perubahan suku bunga/likuiditas memengaruhi kredit, konsumsi, investasi, output, dan inflasi.
- **Trickle-down:** Pandangan bahwa pertumbuhan otomatis “menetes” ke bawah; sering diperdebatkan karena transmisi manfaat tidak selalu merata.
- **UMKM:** Usaha mikro, kecil, dan menengah; aktor penting inklusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, tetapi sering terkendala akses kredit/pasar.
- **Upah riil:** Upah nominal yang disesuaikan inflasi; indikator kesejahteraan pekerja.
- **Volatilitas:** Derajat fluktuasi (mis. kurs, inflasi, harga komoditas) yang meningkatkan ketidakpastian dan risiko investasi.

Referensi

Sumber Indonesia (data & kebijakan)

1. Badan Pusat Statistik. (2025, 15 Januari). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381* (Siaran pers). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
2. Badan Pusat Statistik. (2025, 5 Mei). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 tumbuh 4,87 persen (y-on-y)* (Siaran pers). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
3. Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen (y-on-y)* (Siaran pers). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4. Badan Pusat Statistik. (2025, 3 November). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Oktober 2025 sebesar 2,86 persen* (Siaran pers). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
5. Bank Indonesia. (n.d.). *Target inflasi*. (Diakses 23 Desember 2025). ([Bank Indonesia](#))
6. Bank Indonesia. (2025, 30 Oktober). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi...* (Siaran pers RDG). ([Bank Indonesia](#))
7. Bank Indonesia. (2025, 17 Desember). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi...* (Siaran pers RDG). ([Bank Indonesia](#))

Literatur inti (teori & bukti empiris)

8. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28. ([American Economic Association](#))
9. Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). *Redistribution, inequality, and growth* (IMF Staff Discussion Note SDN/14/02). International Monetary Fund. ([IMF](#))
10. Ianchovichina, E., & Lundstrom, S. (2009). *Inclusive growth: Analytics and framework* (World Bank Policy Research Working Paper No. 4851). World Bank. ([World Bank](#))
11. OECD. (2015). *In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. OECD Publishing. ([OECD](#))
12. Okun, A. M. (1975). *Equality and efficiency: The big tradeoff*. Brookings Institution Press. ([Google Books](#))
13. Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century* (A. Goldhammer, Trans.). Belknap Press of Harvard University Press. ([Harvard University Press](#))
14. Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company. ([W. W. Norton & Company](#))
15. Tinbergen, J. (1952). *On the theory of economic policy*. North-Holland

Publishing Company. ([Google Books](#))

16. Schaeffer, P. V. (2019). *A note on the relevance of Tinbergen* (working paper). ([PETER V. SCHAEFFER](#))

17. OECD & World Bank. (2012). *Promoting inclusive growth: Challenges and policies*. ([World Bank](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking, Access date: 23 December 2025. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))
<https://chatgpt.com/c/694a80d0-9898-8323-8de5-03f30fa8ca12>